MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG
TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan sebagai inovasi pelayanan publik terpuji kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah berkenaan dengan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2019, perlu untuk menetapkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Urutan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 disusun berdasarkan abjad instansi dan tidak menggambarkan peringkat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 78 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN TOP 45 INOVASI
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
A. KEMENTERIAN				
1	Kementerian Dalam Negeri	Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran "SUPERTAJAM"	Tata Kelola Pemerintahan	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	*One Stop Service Quarantine* (OSS-Q) – Distribusi Hasil Perikanan Lebih Mudah, Lebih Cepat, dan Terpercaya di Instalasi KIPM Puspa Agro	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Surabaya II
3	Kementerian Keuangan	IdS - *Internship* dan *Secondment* bagi Pemerintah Daerah	Tata Kelola Pemerintahan	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Melalui PROPER Tingkatkan Ketaatan, Pacu Efisiensi, Dorong Inovasi Industri, dan Berdayakan Masyarakat untuk Pembangunan Berkelanjutan	Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SIPONGI – Sistem Informasi Peringatan dan Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web	Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
6	Kementerian Luar Negeri	KBRI KL JAMAN *NOW*	Pemberdayaan Masyarakat	KBRI Kuala Lumpur
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SIBIMA KONSTRUKSI SIGAP (Sistem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi Untuk Siap Gapai Pekerjaan)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Balai Penerapan Teknologi Konstruksi
8	Kementerian Perdagangan	SUKA INDONESIA (Sistem Surat Keterangan Asal Indonesia)	Tata Kelola Pemerintahan	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
9	Kementerian Perindustrian	si Telmi BIAM (Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih Baristand Industri Ambon)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Balai Riset dan Standardisasi Industri Ambon
B. LEMBAGA				
10	Badan Pusat Statistik	RADAR PADI: Raih Data Akurat Padi dengan Metode Kerangka Sampel Area untuk Mendukung Kebijakan Pangan	Ketahanan Pangan	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
11	BPJS Kesehatan	INSIDEN (*Integrated System For Traffic Accident*) sebagai Perwujudan Percepatan Reformasi Birokrasi Penjaminan Korban Kecelakaan Lalu Lintas	Kesehatan	Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan
12	Kepolisian Negara Republik Indonesia	SKCK *Online* dan SKCK Keliling *Online* Polresta Sidoarjo	Tata Kelola Pemerintahan	Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Polda Jawa Timur
13	Lembaga Administrasi Negara	Laboratorium Inovasi	Tata Kelola Pemerintahan	Pusat Inovasi Administrasi Negara
C. PROVINSI				
14	Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	SEPATU JOLIFA (Sistem Perpustakaan Terpadu Jogja *Library for All*)	Pendidikan	Balai Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
15	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	TELOR DADAR (Telepon Orang dalam Kedaruratan) 112	Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
16	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	SI PERUT LAPER (Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan)	Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan
17	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	JAMIN DOKTER DATANG TEPAT WAKTU melalui TELE APIK: TEyeng ndeLEng (dapat melihat) Antrean Pendaftaran lan (dan) poliklinIK	Kesehatan	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
18	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	SIPELANDUKILAT (Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman)	Pelayanan Publik Responsif Gender	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
D. KABUPATEN				
19	Pemerintah Kabupaten Badung	BATIK (Badung Anti Kantong Plastik) Berbasis Kearifan Lokal	Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
20	Pemerintah Kabupaten Badung	*Fish-GO* (Penentuan Area Penangkapan Ikan)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Badan Penelitian dan Pengembangan
21	Pemerintah Kabupaten Banggai	Gerakan Moral PINASA	Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan
22	Pemerintah Kabupaten Bangka	RANSEL SI DORA	Kesehatan	Dinas Kesehatan
23	Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	OCe OKe Siasat Keren Cegah 3 Terlambat dengan 4 Pantauan	Kesehatan	UPTD Puskesmas Pejawaran, Dinas Kesehatan
24	Pemerintah Kabupaten Bantul	SIPERKASA Mengatasi Masalah Pasca Panen Mendukung Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	UPTD Balai Benih Pertanian, Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
25	Pemerintah Kabupaten Banyumas	PATTAS SOSIAL MITRA KURIR LANGIT (Penanganan Cepat, Tanggap dan Tuntas dalam Pendampingan Warga Miskin Penderita Sakit Kronis)	Pengentasan Kemiskinan	Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
26	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Banyuwangi Festival	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
27	Pemerintah Kabupaten Bima	Sentuh Perempuan dengan SIMAWAR	Pelayanan Publik Responsif Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
28	Pemerintah Kabupaten Bogor	SI DALIMU DALIYA (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya)	Tata Kelola Pemerintahan	RSUD Ciawi
29	Pemerintah Kabupaten Brebes	Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) Atasi Anak Tidak Sekolah (ATS)	Pendidikan	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
30	Pemerintah Kabupaten Cilacap	BALAKAR *TO RESPONSE TIME* (BArisan SukareLA KebaKARan menuju *Response Time)*	Pemberdayaan Masyarakat	UPT Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja
31	Pemerintah Kabupaten Grobogan	Rumah Kedelai Grobogan	Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian
32	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	AYUNDA SI MENIK MAKAN SEGO CETING (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah *Stunting*)	Kesehatan	UPT Puskesmas Gedangsari II, Dinas Kesehatan
33	Pemerintah Kabupaten Magelang	Misteri Calon Pengantin Paseso Merapi (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat)	Pemberdayaan Masyarakat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
34	Pemerintah Kabupaten Merauke	SIMPATIK (Sistem Pelayanan Tiga Puluh Detik)	Tata Kelola Pemerintahan	Kampung Amun Kay Distrik Tanah Miring

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
35	Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Rumah Sakit Rasa Toyota	Kesehatan	RSUD KRT Setjonegoro
E. KOTA				
36	Pemerintah Kota Ambon	Ambon *City Of Music*	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
37	Pemerintah Kota Cilegon	KADER GEGANA PEDES (Gerakan Warga Binaan Peduli Kesehatan)	Kesehatan	UPTD Puskesmas DTP Cibeber, Dinas Kesehatan
38	Pemerintah Kota Cimahi	*Gastrodiplomacy* Cireundeu	Ketahanan Pangan	Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
39	Pemerintah Kota Denpasar	Senyum Melia di Tubin	Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Kesiman Kecamatan Denpasar Timur
40	Pemerintah Kota Makassar	LABINOV BEKEN (Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan)	Tata Kelola Pemerintahan	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
41	Pemerintah Kota Malang	Brexit (*Braille E-Ticket And Extraordinary Access For Visual Disabilities*)	Kesehatan	UPTD Puskesmas Janti Dinas Kesehatan
42	Pemerintah Kota Manado	PANADA (Portal Analisis Data Berbasis Peta)	Tata Kelola Pemerintahan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
43	Pemerintah Kota Palembang	SELFI (Sekolah Filial – Layanan Pendidikan Formal Narapidana Anak di LPKA Klas I Palembang)	Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
44	Pemerintah Kota Tangerang	Pelayanan Kunjungan Rumah Cageur Jasa	Kesehatan	Dinas Kesehatan
F. BADAN USAHA MILIK NEGARA				
45	PT Taspen (Persero)	Wirausaha Pintar (Kewirausahaan Aparatur Sipil Negara dan Pensiunan untuk Kesejahteraan)	Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Divisi Layanan dan Pemasaran

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

SYAFRUDDIN